

**ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA PENGARUH  
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI  
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK),  
DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN  
(SiLPA) TERHADAP BELANJA DAERAH  
(Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi  
Sumatera Barat Tahun 2016-2020)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Negeri Padang*



**OLEH :**

**RAHMAT NUR RAFI  
2016 / 16043027**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI PADANG  
2022**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**  
**ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA PENDAPATAN ASLI DAERAH,**  
**DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA LEBIH**  
**PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP BELANJA DAERAH**

( Studi Empiris Pada Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera  
Barat Periode 2016 – 2020 )

Nama : Rahmat Nur Rafi  
NIM / TM : 16043027/ 2016  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi

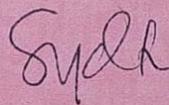
Padang, Agustus 2022

Disetujui Oleh :  
Pembimbing



Fefri Indra Arza, SE., M.Sc., Ak.  
NIP. 197302131999031003

Mengetahui,  
Ketua Program Studi Akuntansi



Sany Dwita, SE., M.Si., Ak, CA, Ph.D  
NIP. 19800103 200212 2 001

**HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI**

**Dinyatakan Lulus Ujian Setelah Dipertahankan Di Depan Tim Penguji  
Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi**

**Universitas Negeri Padang**

**Judul : ANALISIS FLYPAPER EFFECT PADA  
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI  
UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS, DAN SISA  
LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TERHADAP  
BELANJA DAERAH ( Studi Empiris Pada  
Pemerintahan Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera  
Barat Periode 2016 – 2020 )**

**Nama : Rahmat Nur Rafi**

**NIM / NIM : 16043027 / 2016**

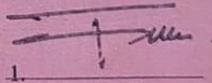
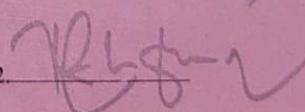
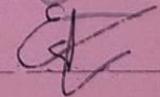
**Program Studi : Akuntansi**

**Keahlian : Akuntansi Sektor Publik**

**Fakultas : Ekonomi**

**Padang, Agustus 2022**

**Tim Penguji**

<b>No</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Tanda Tangan</b>
1.	Ketua	Fefri Indra Arza, SE., M.Sc., Ak.	1. 
2.	Anggota	Halkadri Fitra, SE, AK, M.M.	2. 
3.	Anggota	Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak.	3. 

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Nur Rafi  
NIM/Tahun : 16043027 / 2016  
Masuk  
Tempat/Tgl. Lahir : Koto Panjang / 10 Februari 1998  
Program Studi : Akuntansi  
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik  
Fakultas : Ekonomi  
Alamat : Sungayang, Batusangkar-Tanah Datar  
No. HP/Telp : 081266869139  
Judul Skripsi : ANALISIS *FLYPAPER EFFECT* PADA PENGARUH  
PENDPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI  
UMUM (DAU), DANA ALOKASI KHUSUS (DAK),  
DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN  
(SILPA) TERHADAP BELANJA DAERAH (Studi  
Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi  
Sumatera Barat Tahun 2016 - 2020)

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh tim pembimbing, tim penguji dan ketua jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **sanksi akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Desember 2022

Saya yang Menyatakan



NIM. 16043027

## ABSTRAK

**Rahmat Nur Rafi. (16043027). Analisis *Flypaper Effect* Pada Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Terhadap Belanja Daerah. (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020).**

**Pembimbing : Fefri Indra Arza, SE., M.Sc., Ak.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh PAD, DAU, DAK dan SILPA terhadap Belanja Daerah, selain itu juga mengkaji apakah fenomena FLYPAPER EFFECT terjadi pada pemerintah daerah di Sumatera Barat. Populasi dalam penelitian ini adalah Pemerintah Provinsi Indonesia tahun 2016-2020. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, DAU, DAK, dan SILPA berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah dan juga terjadinya fenomena FLYPAPER EFFECT pada pemerintah daerah di Sumatera Barat.

**Kata Kunci: *Flypaper Effect*, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Belanja Daerah.**

## KATA PENGANTAR

Puji serta syukur penulis sampaikan kepada Allah subhanahu wata'ala atas segala rahmat, berkat, dan karunia-Nya yang diberikan sehingga penulis dapat diberi kemudahan kelancara dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat (Studi Empiris Pada Pemerintah Kabupaten/Kota se Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020). Skripsi ini merupakan salah satu syarat guna menyelesaikan pendidikan S-1 serta memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Selama proses penyusunan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik, oleh karea itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Fefri Indra Arza, SE., M.Sc., Ak., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan, ilmu serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE., Ak., M.M. selaku dosen penelaah yang telah banyak memberikan saran dan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.

3. Ibu Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak. selaku dosen penguji yang telah banyak memberikan saran dan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Sany Dwita, S.E., M.Si.,Ak., CA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Salma Taqwa, SE., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan ilmu dan nasihat kepada penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan/karyawati Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Untuk kedua orang tua saya, Bapak Alm. Jasman dan Ibu Rusnelni. Terima kasih untuk ibu saya yang hebat yang berjuang siang dan malam demi anaknya hingga sampai ke jenjang sarjana. Terima kasih ibu untuk kasih sayang dan doa ibu yang tulus sepanjang masa.
9. Untuk saudara saya, Indra Yanto, Vera Wati Riosman yang selalu membantu saya dan selalu mendorong saya untuk selalu semangat.
10. Untuk Iqva Andaresya yang selalu setia, selalu menyemangati saya dan senantiasa menemani saya dalam penulisan skripsi.
11. Seluruh teman-teman akuntansi A 2016, terimakasih atas segala support kalian, sukses untuk kita semua.
12. Seluruh pihak-pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu.

Terimakasih telah membantu, mendukung dan mendoakan dalam menyelesaikan penuliskripsi ini.

Semoga seluruh bimbingan, bantuan, dukungan, doa, serta motivasi yang diberikan tidak sia-sia dan semoga Allah subhanahu wata'ala memberikan imbalan yang berlipat ganda. Dalam hal ini penulis menyadari bahwa pengetahuan yang penulis miliki masih sangat terbatas, oleh karena itu penulis meminta maaf ataskekurangan dalam penulisan skripsi ini. Penulis berharap atas saran dan kritik yang membangun dari banyak pihak demi kebaikan skripsi ini, penulis juga berharapskripsi ini nantinya dapat memberikan manfaat.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu.*

Padang, Desember 2022

Rahmat Nur Rafi

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR ISI</b> .....	
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>10</b>
A. Kajian Teori.....	10
1. Teori Agensi (Agency Theory) .....	10
2. Belanja Daerah .....	13
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) .....	16
4. Dana Alokasi Umum (DAU) .....	19
5. Dana Alokasi Khusus (DAK).....	23
6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	26
7. Flypaper Effect .....	27
B. Penelitian Terdahulu .....	28
C. Hubungan Antar Variabel .....	31
1. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah.....	31
2. Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah.....	33

3.	Hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Hubungan antara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	
4.	(SILPA) dengan Belanja Daerah .....	36
5.	Analisis fenomena <i>Flypaper Effect</i> terhadap Belanja	
6.	Daerah .....	37
D.	Kerangka Konseptual.....	37
E.	Hipotesis.....	38
<b>BAB III</b>	<b>METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A.	Jenis dan Objek Penelitian .....	41
B.	Populasi dan Sampel.....	41
C.	Jenis dan Sumber Data.....	33
1.	Jenis Data .....	33
2.	Sumber Data.....	33
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	33
E.	Variabel Penelitian .....	34
1.	Variabel Dependen .....	34
2.	Variabel Independen.....	34
F.	Pengukuran Variabel.....	35
1.	Belanja Daerah .....	35
2.	Variabel Pendapatan Asli Daerah .....	35
3.	Variabel Dana Alokasi Umum .....	36
4.	Variabel Dana Alokasi Khusus .....	36
5.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA).....	37
6.	<i>Flypaper Effect</i> .....	37
G.	Teknik Analisis Data .....	37
1.	Analisis Deskriptif .....	38
2.	Uji Asumsi Klasik .....	38
3.	Uji Hipotesis.....	43
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A.	Gambaran Umum Objek Penelitian .....	44
B.	Deskripsi Variabel Penelitian.....	46

1.	Belanja Daerah .....	46
2.	Pendapatan Asli Daerah.....	49
3.	Dana Alokasi Umum .....	51
4.	Dana Alokasi Khusus .....	53
5.	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.....	55
C.	Analisis Data .....	57
1.	Statistik Deskriptif.....	57
2.	Uji Asumsi Klasik .....	59
3.	Uji Hipotesis.....	63
D.	Pembahasan.....	71
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>77</b>
5.1	Kesimpulan .....	77
5.2	Keterbatasan Penelitian.....	78
5.3	Saran .....	78
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>80</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>		

## DAFTAR TABEL

1. 1. Rasio Tingkat Kemandirian Daerah .....	
4.1 Nama Kota/Kabupaten Sumatera Barat .....	
4.2 Prosedur Penentuan Data .....	
4.3 Realisasi Belanja Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Barat Tahun 2016 -2020 .....	
4.4 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Barat Tahun 2016 -2020 .....	
4.5 Realisasi Dana Alokasi Umum Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Barat Tahun 2016 -2020 .....	
4.6 Realisasi Dana Alokasi Khusus Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Barat Tahun 2016 -2020 .....	
4.7 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Pemerintah Kota/Kabupaten Di Sumatera Barat Tahun 2016 -2020 .....	
4.8 Analisis Deskriptif .....	
4.9 Uji Normalitas .....	
4.10 Uji Multikolinearitas .....	
4.11 Uji Heterokedastisitas .....	
4.12 Uji Autokorelasi .....	
4.13 Regresi Linier Berganda .....	
4.14 Uji F .....	
4.15 Uji Koefisien Determinasi SILPA, DAU dan DAK.....	
4.16 Uji Koefisien Determinasi PAD .....	
4.17 Uji t (Parsial) .....	
4.18 Perbandingan Uji F (DAU, DAK, dan SILPA) dengan Uji t (PAD) terhadap Belanja Daerah .....	

## DAFTAR GAMBAR

2.1	Kernagka Konseptual.....	38
-----	--------------------------	----



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keberhasilan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah memberikan dampak positif untuk perekonomian daerah. Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan proses otonomi daerah, dengan cara memaksimalkan potensi sumber pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan daerah. Dengan pengotimalan sumber pendapatan daerah, pemerintah daerah dapat menganggarkan anggaran belanja daerah secara maksimal untuk kepentingan pelayanan publik. Kebijakan tentang otonomi daerah merupakan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah karena setiap daerah harus dapat tumbuh dan berkembang secara mandiri dengan sedikit ikut campur tangan dari pemerintah pusat (Inayati, 2017). Kemandirian daerah dapat dilihat dari bagaimana jumlah sumber pendapatan daerah yang dihasilkan oleh pemerintah daerah untuk dapat memenuhi kebutuhan belanja daerah.

Selama ini mayoritas pemerintah daerah selalu bergantung pada suntikan dana dari pemerintah pusat. Dana transfer perimbangan diantaranya yaitu DAK atau Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Dana Alokasi Umum merupakan pendapatan daerah yang berasal dari APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. APBN dialokasikan ke daerah dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang kemudian digunakan untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Sidik et al., 2002)

Tujuan dari transfer adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya standar pelayanan publik minimum di seluruh negeri (Sidik et al., 2002). Kebutuhan pelayanan publik berbeda-beda di setiap daerah. Dalam rangka menyediakan pelayanan publik, maka pemerintah daerah melakukan suatu pengeluaran yang disebut belanja daerah. Permasalahan yang terjadi saat ini, pemerintah daerah terlalu menggantungkan diri pada alokasi DAU untuk membiayai belanja modal dan pembangunan tanpa mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah.

Kuncoro, (2004) menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling besar 20%. Kenyataan inilah yang menimbulkan perilaku asimetris pada pemerintah daerah. Kesenjangan fiskal atas pelaksanaan otonomi daerah yang terjadi di Indonesia juga mengakibatkan setiap daerah yang terdesentralisasi memiliki tanggung jawab yang besar namun tidak diiringi dengan kapasitas fiskal yang memadai. Desentralisasi fiskal membuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat, hal ini karena dana yang di transfer oleh pemerintah pusat lebih besar dari pada pendapatan asli daerahnya sendiri. Sedangkan transfer dari pusat pada awalnya bertujuan untuk menyamaratakan kemampuan keuangan daerah, yang kemudian disebut *flypaper effect*.

*Flypaper effect* merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak dengan menggunakan dana perimbangan untuk kepentingan belanja daerah daripada menggunakan PAD (pendapatan asli daerah) (Listiorini, 2012). Fenomena *flypaper effect* secara umum diartikan sebagai suatu kondisi dimana pembiayaan belanja daerah lebih tinggi

menggunakan atau memanfaatkan dana transfer dibandingkan dengan menggunakan Pendapatan Asli Daerah (Yulina et al., 2017). *Flypaper effect* terjadi karena dua syarat yaitu ketika dalam hasil pengujian yang diperoleh menunjukkan (1) besarnya nilai koefisien DAU yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nilai koefisien PAD dan koefisien keduanya signifikan, (2) nilai koefisien PAD tidak signifikan (Maimunah, 2006)

**Tabel 1.1 Rasio Tingkat Kemandirian Daerah**

<b>Kab/Kota</b>	<b>PAD</b>	<b>DAU</b>	<b>% PAD Terhadap DAU</b>
<b>Tanah Datar</b>	115.914.187.915	695.555.745.000	16 %
<b>Kota Solok</b>	40.742.809.270	398.106.262.000	10 %
<b>Kota Payakumbuh</b>	103.244.423.500	437.696.934.000	23 %
<b>Bukit Tinggi</b>	101.936.792.227	450.905.882.000	22 %
<b>Sijunjung</b>	79.055.940.215	548.573.107.000	14 %

*Sumber : APBD Kabupaten/Kota se Sumatera Barat tahun 2019*

Dilihat dari data di atas, dana transfer dari pemerintah pusat mengakibatkan kecenderungan dari pemerintah daerah untuk memperbanyak Belanja Daerah menjadi tinggi tetapi tidak diimbangi dengan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Tabel diatas merupakan data APBD Provinsi Sumatera Barat tahun 2019, dapat dilihat bahwa jumlah dana PAD dibandingkan DAU masih sangat kecil, berkisar antara 10% sampai 23%. Data diatas menunjukkan bahwa sejak diberlakukannya otonomi daerah. Pemerintah daerah masih bergantung terhadap pemerintah pusat. Hal ini menimbulkan pertanyaan apa penyebab dari *flypaper effect* sehingga pemerintah daerah belum bisa melakukan belanja dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Selain ketergantungan fiskal, *flypaper effect* juga dapat menimbulkan terjadinya asimetri saat terjadi perubahan fiskal. Ketika DAU meningkat, pemerintah daerah membelanjakan tambahan pendapatan, namun ketika jumlah DAU berkurang belanja daerah tidak berkurang (Junaidi, 2012). Perilaku fiskal pemerintah daerah dalam merespon transfer dari pemerintah pusat menjadi perhatian utama dalam menunjang efektivitas transfer. Dominannya peran transfer dibanding pendapatan asli daerah dalam membiayai belanja pemerintah daerah sebenarnya tidak memberikan panduan yang baik bagi pemerintahan. Bukti empiris internasional menunjukkan bahwa tingginya ketergantungan pada transfer ternyata berhubungan negatif dengan hasil pemerintahannya (Yulina et al., 2017). Dalam pelaksanaan desentralisasi, peran transfer tidak dapat dihindarkan mengingat otonomi yang dilimpahkan menuntut daerah untuk dapat menyelesaikan berbagai urusan pemerintahan yang menjadi wewenang daerah. Hal ini tentu saja mengakibatkan biaya yang harus dikeluarkan daerah dalam mengemban urusan pemerintahan daerah lebih banyak dibanding sebelum otonomi.

Namun pada praktiknya, transfer dari pemerintah pusat merupakan dana utama pemerintah daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari, yang oleh Pemerintah Daerah dilaporkan di perhitungan APBD. Hal ini dapat disebabkan oleh perbedaan penafsiran mengenai DAU oleh daerah-daerah. Saragih (2003) menjelaskan terdapat berbagai penafsiran tersebut diantaranya (a) DAU merupakan hibah yang diberikan pemerintah pusat tanpa ada

pengembalian, (b) DAU tidak perlu dipertanggungjawabkan karena DAU merupakan konsekuensi dari penyerahan kewenangan atau tugas-tugas umum pemerintahan ke daerah, (c) DAU harus dipertanggungjawabkan, baik ke masyarakat lokal maupun ke pusat, karena DAU berasal dari dana APBN.

Prakoso (2004) dan Maimunah (2006) melakukan penelitian pada Kabupaten/Kota Jawa Tengah, DIY dan di Pulau Sumatera mengenai Flypaper Effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah. Dalam model prediksi Belanja Daerah daya prediksi Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Daerah tetap lebih tinggi dibanding daya prediksi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini telah terjadi Flypaper Effect yang berarti bahwa tingkat ketergantungan pemerintah Kabupaten/Kota terhadap pemerintah pusat masih tinggi.

Selanjutnya menurut Sukartono (Mianto & Priyadi, 2019) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah diterima secara signifikan, sedangkan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah diterima namun tidak signifikan. Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Jawa Timur mengalami Flypaper Effect, respon Belanja Daerah masih lebih besar disebabkan oleh Dana Perimbangan khususnya yang berasal dari komponen Dana Alokasi Umum (DAU). Selanjutnya penelitian (Yulina et al., 2017) menunjukkan terdapat pengaruh Dana Bagi Hasil

(DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Selatan hal ini dikarenakan adanya *flypaper effect* yang terjadi di daerah tersebut dimana alokasi belanja masih dibiayai dari Dana Perimbangan dari pemerintah pusat.

Penelitian ini penting dilakukan untuk mengungkap adakah faktor/penyebab yang mendasar dalam fenomena *flypaper effect* pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat karena banyaknya daerah yang semakin bergantung pada dana transfer daripada Pendapatan Asli Daerahnya sehingga terjadi *flypaper effect* sehingga menyebabkan stigma negatif pemerintah daerah, untuk itu harus ada kajian teoritis secara komprehensif sehingga pemerintah daerah dapat memperbaikinya. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya dalam objek penelitian dan jenis variabel yang digunakan. Objek penelitian mencakup Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dengan menggunakan analisis data panel untuk periode tiga tahun, tahun 2016 sampai dengan 2020.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Analisis *Flypaper Effect* pada Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diidentifikasi peneliti adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah ?
2. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah ?
3. Bagaimana Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah ?
4. Bagaimana Pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah ?
5. Apakah terjadi atau tidaknya *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk melihat pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah?
2. Untuk melihat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Daerah ?
3. Untuk melihat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Daerah ?
4. Untuk melihat pengaruh Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap Belanja Daerah ?
5. Untuk melihat terjadi atau tidaknya fenomena *Flypaper Effect* pada Belanja Daerah kabupaten/kota di Sumatera Barat ?

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Sebagai pembelajaran awal dalam melakukan penelitian, juga menambah pengetahuan dan pemahaman tentang keuangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah beserta pengelolaan keuangan daerah.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menerapkan sistem perimbangan daerah yang lebih baik lagi untuk kedepannya sejalan dengan tujuan otonomi daerah sehingga dapat mewujudkan desentralisasi fiskal.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan ilmu akuntansi, khususnya akuntansi sektor publik dan manajemen keuangan daerah dan sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS**

#### **A. Kajian Teori**

##### **1. Teori Agensi (Agency Theory)**

Jensen, M.C Meckling (1976) menjelaskan teori keagenan adalah teori yang menjelaskan bagaimana hubungan diantara dua atau lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu pihak (*principal*) membuat suatu kontrak kerja yang telah disepakati yang berisi wewenang dan tanggungjawabnya dengan pihak lain (*agent*) yang harapannya agen akan melakukan pekerjaan seperti yang diinginkan oleh *principal*. Hal ini merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principals* dan *agents*.

Masalah keagenan merupakan fenomena yang seringkali ditemukan dalam suatu organisasi baik di sektor privat maupun sektor publik. dari masalah keagenan teori ini berusaha untuk menjelaskan masalah keagenan yang terjadi antara pihak-pihak yang saling bekerja sama, namun memiliki tujuan dan pembagian kerja yang berbeda. Menurut (Jensen, M.C Meckling, 1976) teori keagenan menjelaskan penetapan beberapa gagasan pengendalian organisasional yang didasarkan pada keyakinan bahwa pemilik perusahaan dari manajemen menciptakan harapan pemilik yang diabaikan.

Permasalahan hubungan keagenan akan mengakibatkan terjadinya informasi asimetris (*information asymmetry*) dan konflik kepentingan (*conflict of interest*) (Jensen, M.C Meckling, 1976). Pada mulanya penerapan otonomi daerah membuka celah diaplikasikannya teori keagenan dalam riset penganggaran

publik yang merupakan contoh penerapan hubungan pendelegasian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Mardiasmo, 2012). Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola keuangannya dalam kerangka desentralisasi yang sepenuhnya diserahkan oleh pemerintah daerah. Tetapi, pengelolaan dan pengalokasian sumber daya yang dibutuhkan, tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah, maka pemerintah memberikan wewenang kepada pihak lain untuk mengelola sumber daya tersebut, hal ini dikarenakan pemerintah tidak memiliki dana yang cukup untuk alokasi sumber daya tersebut. Oleh karena adanya keterbatasan dana tersebut, maka pembuatan anggaran diperlukan sebagai mekanisme yang penting untuk mengalokasikannya. Adanya tujuan berbeda antara prinsipal dan agen seringkali menimbulkan masalah keagenan (Mardiasmo, 2012).

Hubungan teori keagenan (*agency theory*) dalam penelitian ini dapat dilihat melalui hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam penyaluran dana perimbangan dan juga hubungan antara masyarakat yang diprosikan oleh DPRD (prinsipal) dengan pemerintah daerah (agen) (Ardiansyah dkk, 2014). DPRD (legislatif) untuk mengawasi kinerja manajemen dalam pemerintah daerah (eksekutif) agar segala kebijakan yang diambil pemerintah dapat mengutamakan kepentingan rakyat. Pelaksanaannya pemerintah pusat akan memberikan dana transfer berupa dana perimbangan yang penggunaannya diserahkan penuh kepada pemerintah daerah yang tujuannya adalah membantu pemerintah daerah, baik dalam mendanai kebutuhan pemerintahan sehari-hari. Meskipun diserahkan sepenuhnya kepada

pemerintah daerah, pengelolaan keuangan ini penggunaannya juga harus sampai untuk kepentingan rakyat dalam memberi pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat, karena uang adalah milik rakyat. Oleh karena itu, penggunaannya harus benar dialokasikan untuk sektor-sektor yang mengutamakan kepentingan publik yang dapat meningkatkan pemasukan bagi daerah juga tentunya.

Teori keagenan juga tersirat dalam hubungan pemerintah daerah dengan masyarakat (Ardiansyah dkk, 2014). Hal ini akan diuraikan oleh teori keagenan yang memisahkan antara fungsi manajemen dan fungsi pengawasan. Masyarakat sebagai prinsipal telah memberikan sumber daya kepada daerah berupa pembayaran pajak daerah, retribusi dan sebagainya untuk dapat meningkatkan pendapatan asli daerah. Pemerintah daerah selaku agen dalam hal ini, sudah seharusnya memberikan timbal balik kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan publik yang memadai, yang didanai oleh pendapatan daerah itu sendiri. Disinilah peran teori agensi dalam menjelaskan hubungan keagenan pada sektor publik.

Teori keagenan menjelaskan bahwa pihak yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran memiliki kecenderungan untuk memaksimalkan utilitasnya melalui pengalokasian sumber daya dalam anggaran. Eksekutif sebagai pengusul anggaran dan sekaligus sebagai pelaksana anggaran berupaya memaksimalkan jumlah anggaran, sedangkan legislatif yang dipilih oleh rakyat memanfaatkan anggaran sebagai alat pengawasan. Legislatif dapat mengubah jumlah anggaran dan mengubah distribusi belanja/pengeluaran. *Flypaper effect* yang terjadi dalam

penyusunan APBD dapat dieliminasi oleh perilaku eksekutif dan legislatif dalam memutuskan persetujuan anggaran.

## **2. Belanja Daerah**

Menurut PSAP No.2 belanja adalah “Semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi saldo Anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah”. Sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang, “Belanja Daerah didefinisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih”. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktifitas. Belanja Daerah, meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan untuk tujuan pelaporan keuangan dikelompokkan sebagai berikut:

### **a) Belanja Operasi**

Belanja Operasi yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Adapun yang termasuk

dalam belanja operasi adalah belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

b) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Nilai aset tetap dalam belanja modal yaitu sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan. Adapun yang termasuk dalam belanja modal adalah belanja modal tanah, peralatan, mesin, gedung, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya.

c) Belanja lain-lain/belanja tak terduga

Belanja lain – lain atau tak terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan diluar prediksi yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.

d) Belanja Transfer

Belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari entitas pelaporan yang lebih tinggi ke entitas pelaporan yang lebih rendah seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah dan dana bagi hasil oleh pemerintah Provinsi ke Kabupaten/Kota serta dana bagi hasil dari Kabupaten/Kota ke Desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 belanja dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a) Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan program dan kegiatan yang termasuk didalamnya belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

b) Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan program dan kegiatan. Adapun yang termasuk ke dalam belanja tidak langsung yaitu belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial dan belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa.

### **3. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UU No. 33 Tahun 2004). Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

PAD berhubungan dengan kewenangan daerah yang bertujuan untuk pengambilan pajak daerah, penerimaan hasil perusahaan milik daerah, retribusi daerah dan lainlain. Maka dari itu pemerintah pusat mengharapkan agar pemerintah daerah bisa mengembangkan dan meningkatkan hasil dari PAD

dengan maksimal untuk membiayai segala pembangunan atau infrastruktur, sarana prasarana daerah pada APBD. Semakin baik PAD suatu daerah maka semakin besar pula Alokasi Belanja Modalnya. PAD yang tinggi selanjutnya akan digunakan oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan memadai sehingga dapat meningkatkan anggaran belanja modal.

Tujuan dari PAD adalah memberikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan kebutuhan di daerahnya. Ada beberapa kendala yang dihadapi pemerintah daerah adalah minimnya pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Presentase PAD yang kecil atau rendah menyebabkan pemerintah daerah mengelola keuangan daerah yang kurang efisien. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari :

a. Pajak Daerah Pajak sendiri yang berarti iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dilaksanakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak yang dikelola atau dipungut oleh pemerintah daerah ada empat jenis pajak yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan diatas air, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar motor dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah air dan air permukaan. Sedangkan pajak yang dikelola atau di pungut pemerintah kota/kabupaten terdiri dari

tujuh jenis pajak yaitu pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan dan pengelolaan galian, dan pajak parkir. (Darise, 2008).

b. **Retribusi Daerah.** Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan. Jenis retribusi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Retribusi jasa usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, pada dasarnya jasa tersebut dapat disediakan oleh swasta meliputi pelayanan yang menggunakan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Retribusi perizinan tertentu adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintahan daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang bermaksud untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana prasarana atau fasilitas tertentu untuk melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. (Darise, 2008).

c. **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan terdiri dari beberapa bagian yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN dan bagian

laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. (Darise, 2008).

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dapat dipisahkan mencakup hasil penjualan aset daerah yang tidak dapat dipisahkan, hasil pemanfaatan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, bunga deposito, penerimaan atas tuntutan ganti rugi, penerimaan komisi, pendapatan denda atas ketelambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak dan denda retribusi, pendapatan hasil eksekusi atas jaminan, pendapatan dari pengembalian, fasilitas sosial dan umum, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dan pendapatan dari angsuran atau cicilan penjualan. (Darise, 2008).

#### **4. Dana Alokasi Umum (DAU)**

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (UU No. 33 Tahun 2004). Pembagian dana untuk daerah melalui bagi hasil berdasarkan daerah penghasil cenderung menimbulkan ketimpangan antar daerah dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar namun kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU yang

relatif kecil. Sebaliknya daerah yang memiliki potensi fiskalnya kecil namun kebutuhan fiskalnya besar akan memperoleh alokasi DAU relatif besar, dengan maksud melihat kemampuan APBD dalam membiayai kebutuhan-kebutuhan daerah dalam rangka pembangunan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD dikurangi dengan belanja pegawai (Halim, 2009).

Untuk mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan dan penguasaan pajak antara Pusat dan Daerah telah diatasi dengan adanya perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah (dengan kebijakan bagi hasil dan DAU minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri). Dengan perimbangan tersebut, khususnya dari DAU akan memberikan kepastian bagi Daerah dalam memperoleh sumber-sumber pembiayaan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran yang menjadi tanggung jawabnya.

Dana Alokasi Umum merupakan salah satu bentuk penerimaan daerah yang bersumber dari dana perimbangan yang mana alokasi DAU yang diberikan kepada daerah disesuaikan dengan kondisi dan potensi daerah tersebut agar tidak terjadi misalokasi dengan prinsip pemberian DAU dimaksudkan untuk menjaga perimbangan dan pemerataan antar daerah, terutama bagi daerah yang miskin. Penentuan DAU dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan daerah yang menjadi target pemberian dengan kebutuhan daerah yang diukur melalui jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografis, dan tingkat pendapatan masyarakat, potensi ekonomi daerah (industri, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan PDRB). Dengan demikian kebijakan alokasi DAU diberikan dengan menggunakan asas proporsi terbalik, dimana daerah miskin akan

menerima DAU lebih besar dari pada daerah yang kaya. Semakin kaya suatu daerah maka semakin kecil DAU yang dialokasikan.

Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1999 yang telah diperbaharui dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah bahwa kebutuhan DAU oleh suatu Daerah (Provinsi, Kabupaten, dan Kota) ditentukan dengan menggunakan pendekatan konsep *Fiscal Gap*, dimana kebutuhan DAU suatu Daerah ditentukan oleh kebutuhan Daerah (*fiscal needs*) dan potensi Daerah (*fiscal capacity*). Dengan pengertian lain, DAU digunakan untuk menutup celah yang terjadi karena kebutuhan Daerah melebihi dari potensi penerimaan Daerah yang ada.

Berdasarkan konsep *fiscal gap* tersebut, distribusi DAU kepada daerah-daerah yang memiliki kemampuan relatif besar akan lebih kecil dan sebaliknya daerah-daerah yang mempunyai kemampuan keuangan relatif kecil akan memperoleh DAU yang relatif besar. Dengan konsep ini beberapa daerah, khususnya daerah yang kaya sumber daya alam dapat memperoleh DAU yang negatif. Variabel-variabel kebutuhan Daerah dan potensi ekonomi Daerah. Kebutuhan Daerah paling sedikit dicerminkan dari variabel jumlah penduduk, luas wilayah, keadaan geografi, dan tingkat pendapatan masyarakat dengan memperhatikan kelompok masyarakat miskin. Sementara potensi ekonomi daerah dicerminkan dengan potensi penerimaan daerah seperti potensi industri, potensi SDA, potensi SDM, dan PDRB.

## **5. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, fungsi dari Dana Alokasi Khusus adalah sumber dana dari Alokasi Anggaran Belanja Negara (APBN) yang ditujukan untuk membantu kebutuhan dan mendanai kegiatan yang bersifat khusus untuk keperluan urusan daerah dan sesuai yang diutamakan oleh negara. (Halim,2012:138) Dengan adanya DAK berharap bisa mempengaruhi alokasi anggaran belanja modal, Karena cenderung penambahan aset tetap terdapat dari DAK yang dimiliki oleh pemerintah untuk peningkatan pelayanan publik. DAK membantu membiayai sarana prasarana secara khusus agar mempercepat pembangunan daerah dan untuk memperlancar kegiatan daerah.

Tujuan dari DAK sendiri untuk mengurangi beban biaya yang ditanggung oleh pemerintah daerah. DAK ini dialokasikan untuk membantu daerah di berbagai bidang yaitu:

- a. DAK bidang Pendidikan DAK dalam bidang pendidikan ini dialokasikan untuk menunjang pelaksanaan program wajib belajar dasar sembilan tahun yang bermutu dan bisa merata di dalam bidang pendidikan untuk Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. (Halim,2014:138)
- b. DAK bidang Kesehatan DAK dalam bidang kesehatan yang dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas kegiatan di bidang kesehatan dan pelayanan dasar dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu dan anak, perbaikan gizi masyarakat pengendalian penyakit, pelayanan

kesehatan bagi penduduk miskin dan daerah terpencil dan daerah perbatasan yang masih terabaikan. (Halim,2014:139).

c. DAK dalam bidang Infrastruktur Jalan DAK dalam bidang Infrastruktur jalan dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan sarana dan prasarana jalan di provinsi, kabupaten maupun didalam kota, yang bertujuan untuk memperlancar distribusi penumpang, barang maupun jasa serta hasil produksi yang memiliki prioritas untuk mendukung sektor pertanian, industri, pariwisata dan lain-lain. Sehingga dapat memperlancar pertumbuhan ekonomi regional berupa kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan di provinsi, kabupaten maupun di kota. (Halim,2014:139).

d. DAK dalam bidang Infrastruktur Irigasi DAK dalam bidang infrastruktur irigasi dialokasikan untuk mempertahankan dan meningkatkan pelayanan sarana prasarana sistem irigasi seperti irigasi di desa yang menjadi urusan kabupaten/ kota dan provinsi. (Halim,2014:140)

e. DAK dalam bidang Pertanian DAK dalam bidang pertanian yang dialokasikan untuk meningkatkan sarana prasarana pertanian di tingkat usaha tani dan desa dalam rangka peningkatan produksi bahan pangan dalam negeri yang bertujuan untuk mendukung ketahanan pangan nasional. (Halim, 2014:140).

DAK dalam bidang Lingkungan Hidup DAK dalam bidang lingkungan hidup yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan sistem pengendalian mutu di bidang lingkungan hidup serta mendorong penguatan kapasitas kelembagaan daerah, dengan tujuan untuk meningkatkan sarana dan

prasarana lingkungan hidup yang berfokus pada kegiatan pencegahan pencemaran udara, dan informasi tentang kerusakan daerah. (Halim, 2014:140).

f. DAK dalam bidang Kelautan dan Perikanan DAK dalam bidang kelautan dan perikanan yang dialokasikan untuk meningkatkan sarana prasarana mulai dari produksi, pengolahan, peningkatan mutu, pemasaran, pewangsan serta penyediaan sarana prasarana pemberdayaan di wilayah pesisir dan pulau kecil yang terkait dengan peningkatan produksi keikanan dan peningkatan kesejahteraan nelayan dari pembudidayaan hingga pemasaran yang didukung dengan penyuluhan di daerah tersebut. (Halim, 2014:141).

g. DAK dalam bidang Pemerintahan DAK dalam bidang pemerintahan yang dialokasikan untuk meningkatkan kinerja dari pemerintah daerah yang memberikan pelayanan publik kurang baik. Utamanya pada daerah- daerah yang prasarana pemerintahannya kurang layak. (Halim, 2014:142)

h. DAK dalam bidang Sarana dan Prasarana Perdesaan DAK dalam bidang sarana dan prasarana perdesaan yang dialokasikan untuk meningkatkan aksesibilitas dan ketersediaan sarana prasarana dasar, memperlancar arus angkutan umum penumpang, bahan pokok dan produk pertanian lainnya yang berawal dari pusat produksi perdesaan ke daerah pemasaran, serta untuk meningkatkan kualitas produktivitas terutama di perdesaan melalui pembangunan infrastruktur yang diutamakan di daerah terpencil atau daerah tertinggal. (Halim, 2014:142).

i. DAK dalam bidang Perdagangan DAK dalam bidang perdagangan yang dialokasikan untuk meningkatkan ketersediaan sarana perdagangan yang

memadai sebagai upaya memperlancar arus barang antar wilayah serta meningkatkan ketersediaan dan kestabilan harga bahan pokok terutama bagi daerah-daerah terpencil. (Halim, 2012:142)

#### **6. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) menurut Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 adalah selisih penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup pelampauan penerimaan PAD, daerah yang sah, peampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisi dana kegiatan lanjutan. Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 37, menyatakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi deficit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan.

#### **7. *Flypaper Effect***

*Flypaper effect* merupakan suatu kondisi stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (unconditional grants) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Iskandar, 2012 dalam (A Solikin, 2016)). Menurut Nahlia (2014) menganggap sebagai suatu anomali dalam

perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan PAD. Fenomena tersebut membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri. Istilah dari *flypaper effect* diperkenalkan pertama kali oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) untuk mengartikan pemikiran “money sticks where it hits”.

*Flypaper Effect* sebagai fenomena utama dalam penelitian ini merupakan suatu kondisi yang terjadi saat pemerintah daerah merespon belanja lebih banyak atau boros dengan menggunakan dana transfer (grants) yang diprosikan dengan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk kepentingan belanja daerah daripada menggunakan kemampuan sendiri yang diprosikan dengan Pendapatan Asli Daerah. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer dari pemerintah pusat akan meningkatkan belanja pemerintahan daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Siagian, 2009). Dalam ekonomi *flypaper effect* dapat dikelompokkan menjadi dua aliran pemikiran, yaitu model birokratik dan ilusi fiskal. Model birokratik menelaah *flypaper effect* dari sudut pandang birokrat, sedangkan model ilusi fiskal mendasarkan kajiannya dari sudut pandang masyarakat yang mengalami keterbatasan informasi terhadap anggaran pemerintah daerahnya. Untuk mengetahui apakah terjadi *flypaper effect* atau tidak di suatu daerah, maka dapat dilakukan dengan dua cara yaitu : (1) engan melihat pengaruh dari pendapatan asli daerah . Jika pendapatan asli Daerah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah maka dapat dikatakan

bahwa telah terjadi flypaper effect. (2) Dengan melihat nilai koefisien dari variabel dana alokasi umum jika nilai koefisien yang dimiliki oleh pendapatan asli daerah lebih besar dari nilai koefisien yang dimiliki oleh dana alokasi umum maka dapat dikatakan tidak terjadi flypaper effect dan begitu juga sebaliknya.

## **B. Penelitian Terdahulu**

Penelitian mengenai belanja daerah sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu seperti penelitian yang dilakukan oleh (Afriani et al., 2019) dalam penelitiannya mengkaji pengaruh DAU, PAD, dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Kabupaten/Kota se Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa tidak terjadi fenomena *flypaper effect* pada belanja daerah dan variabel DAU, PAD, dan SKPD secara signifikan mempengaruhi belanja daerah di Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh (Saifudin, 2018) yang mengkaji *flypaper effect* pada PAD, DAU, DAK terhadap Belanja Daerah di Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah dalam hasil penelitiannya dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan regresi linear berganda menunjukkan bahwa fenomena *flypaper effect* terjadi di daerah ini dimana tidak hanya daerah dengan PAD yang rendah saja, namun daerah dengan PAD tinggi juga terjadi fenomena *flypaper effect* hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah Jawa Tengah mayoritas belanja didanai atas dana perimbangan yaitu dana transfer dari pemerintah pusat. Selanjutnya untuk regresi antara variabel independen dan dependen dalam penelitian ini menghasilkan, bahwa PAD dan DAU berpengaruh

kuat terhadap Belanja Daerah sedangkan untuk DAK tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Ahmad Solikin, 2016), mengkaji tentang Analisis *Flypaper Effect* pada pengujian pengaruh DAU, PAD, SILPA terhadap belanja Pemerintah Daerah di Indonesia. Penelitian na mengambil sampel terhadap Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa terjadinya fenomena *flypaper effect* pada pengelolaan keuangan pemerintah daerah di Indonesia artinya rata-rata pemerintah daerah di Indonesia pada tahun 2012-2014 masih bergantung pada alokasi biaya dari pemerintah pusat. Dan untuk hasil regresi meunjukkan terdapat pengaruh keseluruhan variabel independen terhadap variabel independent.

Selanjutnya hasil (Salawali et al., 2019) juga mengkaji pengaruh DAU, dan PAD terhadap Belanja menunjukkan adana pengaruh positif dan signifikan antara variabel independen yang diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya analisis *flypaper effect* menujuka terjadinya fenomena *flypapereffect* didaerah Provinsi Sulawesi Tengah sehingga menyebabkan kenaikan belanja di tahun berjalan, hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tidak optimal dalam memaksimalkan potensi Sumber Daya yang ada untuk pertumbuhan PAD di Provinsi Sulawesi Tengah. dan menyebabkan ketergantungan terdapat pemerintah pusat ssehingga menyebabkan tingkat kemandirian daerah berkurang.

Hasil penelitian Fikri, F. (2020) yang mengkaji tentang Flypaper Effect analysis on regional expenditure in east Java Province, Indonesia. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa DAU, DBH, dan SILPA berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah di Indonesia dan terjadi fenomena Flypaper Effect terhadap Belanja Daerah di Indonesia. Selanjutnya dalam penelitian yang dilakukan oleh Awwaliyah, N. F. , Agrianto, R., & Farida , D. N. (2019). Yang mengkaji tentang The effect of regional original income and balance funding on regional government finansial performance. Dalam penelitiannya mengatakan bahwa PAD, DAU dan DAK berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah.

Dari hasil penelitian terdahulu dapat disimpulkan bahwa mayoritas Pemerintah Daerah belum bisa mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan fenomena *flypaper effect* sehingga tingkat kemandirian daerah menjadi menurun. Hal ini menjadi daya tarik peneliti untuk meneliti kembali fenomena *flypaper effect* untuk Pemerintah Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat. Peneliti ingin melihat bagaimana optimalisasi sumber daya daerah pada Pemerintah Daerah sebagai sumber pendanaan untuk belanja daerah, apakah terjadi peningkatan kemandirian daerah ataupun sebaliknya. Dan ingin melihat bagaimana pengaruh PAD, DAU, DAK, dan SILPA terhadap Belanja Daerah dengan mengkaji apakah terdapat *fenomena flypaper effect* di Provinsi Sumatera Barat.

### **C. Hubungan Antar Variabel**

#### **1. Hubungan antara Pendapatan Asli Daerah dengan Belanja Daerah**

Halim, (2002) menjelaskan Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber asli ekonomi daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan perbaikan infrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan memacu pertumbuhan perekonomian di daerah. Sedangkan Mardiasmo (2012) menyatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Selama masa Orde Baru, harapan yang besar dari Pemerintah Daerah untuk dapat membangun daerah berdasarkan kemampuan dan kehendak daerah sendiri mengakibatkan ketergantungan fiskal dan subsidi serta bantuan Pemerintah Pusat sebagai wujud ketidakberdayaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam membiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pembiayaan keuangan daerah berdasarkan UU No.5 tahun 1974 didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sebagian kecil dari total APBD, dan Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Pusat yang merupakan sebagian besar dari total APBD. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa semakin tinggi PAD suatu daerah maka akan memberikan peluang pada daerah tersebut untuk meningkatkan Belanja Daerah. Sebagai konsekuensi atas diterapkannya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah dapat dengan leluasa menggali dan mengelola PAD nya agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan. Penelitian terdahulu yang meneliti tentang hubungan antara PAD terhadap

Belanja Daerah yaitu (Saifudin, 2018), (Ahmad Solikin, 2016), (Salawali et al., 2019) menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Melalui PAD yang tinggi, maka dari penelitian tersebut disimpulkan pemerintah dapat menurunkan ketergantungannya terhadap pemerintah daerah. Kondisi ini mencerminkan kemandirian daerah yang baik, karena pemerintah daerah yang memiliki PAD yang tinggi yang artinya pemerintahan pada daerah tersebut dapat mengalokasikan anggaran belanja dengan lebih leluasa tanpa harus bergantung kepada dana transfer pemerintah pusat kepada daerah tersebut.

## **2. Hubungan antara Dana Alokasi Umum dengan Belanja Daerah**

Sebagai salah satu komponen pendapatan daerah, DAU menjadi sumber pendanaan yang penting bagi pemerintah daerah untuk mencukupi kebutuhan belanja. Menurut (Mardiasmo, 2012) DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU dialokasikan untuk provinsi dan kabupaten/kota. DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan tardaerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah (Mardiasmo, 2012).

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah *fiskal* (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Perubahan dalam Undang- undang nomor 33 tahun 2004 menegaskan kembali mengenai formula celah fiskal dan penambahan

variabel DAU. Alokasi DAU bagi daerah yang potensi fiskalnya besar, tetapi kebutuhan fiskalnya kecil akan memperoleh alokasi DAU relatif kecil. Sebaliknya, daerah yang potensi fiskalnya kecil, namun kebutuhan fiskalnya besar, akan memperoleh alokasi DAU relatif besar. Secara implisit, prinsip tersebut menegaskan fungsi DAU sebagai faktor pemerataan kapasitas fiskal. Sebagai transfer tak bersyarat atau block grant maka penggunaan dari DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Meskipun demikian dalam kerangka dasar Undang-undang nomor 22 tahun 1999 dan Undang-undang nomor 25 tahun 1999 disebutkan bahwa penggunaan DAU tersebut diutamakan untuk pembiayaan pelayanan dasar kepada masyarakat daerah.

Berdasarkan UU No.5 tahun 1974 didukung oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang merupakan sebagian kecil dari total APBD, dan Sumbangan dan Bantuan Pemerintah Pusat yang merupakan sebagian besar dari total APBD. Dengan demikian dapat diketahui bahwa semakin tinggi DAU akan memberikan peluang daerah untuk meningkatkan Belanja Daerah. Hal ini disebabkan karena DAU merupakan komponen pada sumbangan dan bantuan pemerintah pusat. Beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Afriani et al., 2019), (Saifudin, 2018), (Salawali et al., 2019) menyimpulkan adanya hubungan yang searah antara DAU dan belanja daerah, di mana peningkatan DAU juga diikuti oleh kenaikan belanja daerah.

### **3. Hubungan antara Dana Alokasi Khusus dengan Belanja Daerah**

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. DAK dialokasikan untuk membantu daerah mendanai kebutuhan fisik sarana dan prasarana dasar yang merupakan prioritas nasional di bidang pendidikan, kesehatan, (pelayanan dasar dan pelayanan rujukan), jalan, irigasi, air minum, sanitasi, prasarana pemerintahan, kelautan, perikanan, pertanian, lingkungan hidup, keluarga berencana, kehutanan, sarana dan prasarana perdesaan, serta perdagangan, Halim (2002).

Teori yang dikemukakan oleh Halim (2002) bahwa pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan tahapan pembangunan yang sudah dikonsepsikan sebelumnya, dimana didalam konsep tersebut pembangunan akan selesai pada saat berakhirnya masa pemerintahan, sehingga pembangunan yang dikonsepsikan akan terbagi menjadi beberapa tahap sesuai dengan kebutuhannya. Seiring berjalannya waktu, pembangunan dilakukan dengan menggandeng perusahaan swasta untuk ikut serta didalam pembangunan hal ini dimaksudkan agar pembangunan dapat cepat selesai sehingga diharapkan laju perekonomian daerah akan berkembang lebih baik. Jika hal ini dapat berjalan dengan baik, maka pemerintah dapat berfokus pada kesejahteraan masyarakatnya dengan menggunakan belanja daerahnya masing-masing. Penelitian yang berhubungan dengan dana alokasi khusus dan belanja daerah ini dilakukan oleh Ulfi Maryati dan Endrawati (2010) melakukan penelitian pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil dari penelitian tersebut adalah secara

simultan DAK berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan DAK secara parsial tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan dana alokasi khusus dan belanja daerah adalah penelitian (Saifudin, 2018) menjelaskan terdapat pengaruh signifikan antara DAU terhadap Belanja Daerah.

#### **4. Hubungan SiLPA (Sisa Lebih Penerimaan Anggaran) dengan Belanja Daerah**

Menurut (Mardiasmo, 2012) SILPA merupakan selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode. SILPA merupakan sumber penerimaan internal pemerintah daerah yang dapat digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan tahun berjalan. Bentuk penggunaan SILPA ada dua, yakni pertama untuk melanjutkan kegiatan yang belum terselesaikan pada tahun sebelumnya dan kedua membiayai kegiatan baru yang tidak teranggarkan dalam APBD murni. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang merupakan penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil daripada realisasi belanja, mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung (belanja barang dan jasa, belanja modal dan belanja pegawai) dan mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum terselesaikan. Penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) menguatkan hal tersebut dimana SILPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Penelitian yang dilakukan oleh (Solikhin, 2016) juga menunjukkan bahwa SiLPA berpengaruh positif terhadap Belanja Modal.

#### **5. Analisis fenomena *Flypaper Effect* terhadap Belanja Daerah**

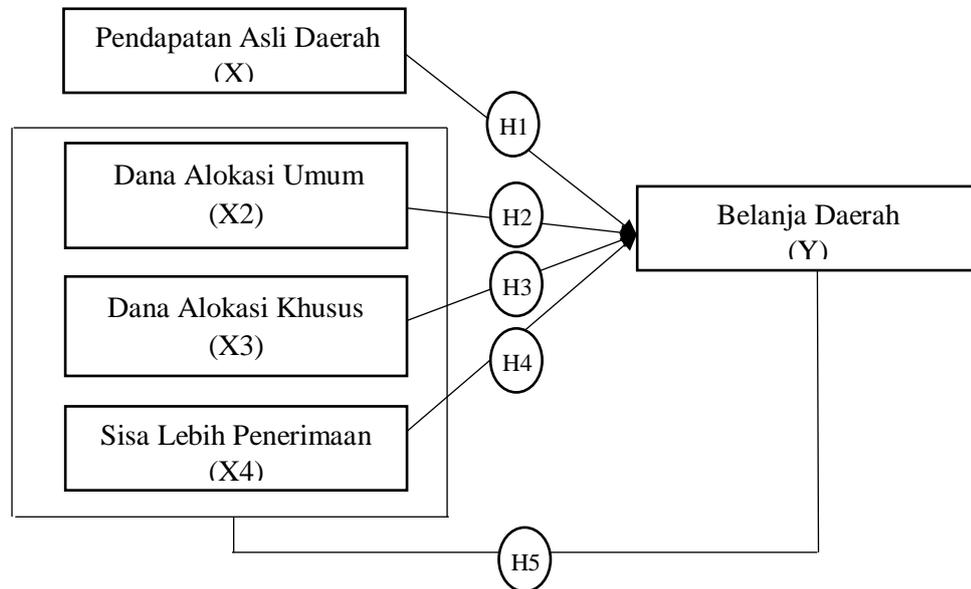
Menurut (Iskandar, 2012) Flypaper effect merupakan suatu kondisi stimulus terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer (unconditional grants) dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah (Iskandar, 2012 dalam (A Solikin, 2016). Menurut Nahlia (2014) menganggap sebagai suatu anomali dalam perilaku rasional jika transfer harus dianggap sebagai tambahan pendapatan masyarakat (seperti halnya pajak daerah), sehingga harus dibelanjakan dengan cara yang sama pula dengan PAD. Fenomena tersebut membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri.

Fenomena *flypaper effect* dianggap dapat meningkatkan Belanja Daerah, hal ini karena tingkat sumber pendanaan daerah meningkat karena adanya dana transfer dari pemerintah pusat (V et al., 2012). Dari pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan dan sumber daya daerah tidak dilakukan secara optimal, sehingga bisa dikatakan Pemerintah Daerah tidak mandiri dalam mengelola keuangan yang bersumber dari PAD untuk mendanai kebutuhan belanja di daerah sendiri.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Hubungan mekanisme antara Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Penerimaan Anggaran terhadap Belanja Daerah adalah sebagai berikut :

**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**



### **E. Hipotesis**

Berdasarkan kerangka berfikir yang telah disajikan tersebut, maka hipotesis penelitian yang dapat disimpulkan dari asumsi diatas adalah sebagai berikut:

H1 : Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

H2 : Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera

H3 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

H4 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh positif signifikan terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

H5 : Terjadi atau tidaknya fenomena *flypaper effect* pada Belanja Daerah di Pemerintah

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Sisa Lebih Pembiayaan terhadap Belanja Daerah. Selain itu, peneliti juga menganalisa fenomena flypaper effect pada DAU, DAK, SILPA dan PAD terhadap Belanja Daerah. Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pengujian hipotesis yang telah diajukan sebelumnya, maka dapat disimpulkan :

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
4. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.
5. Terjadi fenomena flypaper effect pada Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

## **B. KETERBATASAN PENELITIAN**

Penelitian ini telah dirancang dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, namun peneliti menyadari bahwa masih terdapat keterbatasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pada penelitian ini tidak digunakan aspek lain sebagai pendukung untuk melihat pengaruh pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan Dana Alokasi Umum, pertumbuhan Dana Alokasi Khusus, dan pertumbuhan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran terhadap pertumbuhan Belanja Daerah.
2. Penelitian ini hanya dilakukan di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dari periode waktu 2016-2020, dan ini menyebabkan hasil penelitian akan berbeda jika dilakukan di daerah lain mengingat perbedaan karakteristik masing-masing wilayah di Indonesia.

## **C. SARAN**

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada pemerintah daerah agar menggali potensi daerahnya seperti intensifikasi penerimaan pajak daerah dan meminimalisir penggunaan dana perimbangan sehingga terciptanya daerah otonom yang mandiri.

2. Diharapkan penelitian mendatang mampu memperluas jangkauan populasi dan sampel penelitian seperti Kabupaten/Kota se Indonesia dengan periode pengamatan yang lebih panjang.